

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya otonomi daerah cenderung mengajak secara seksama untuk membangun daerah, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasanya pariwisata tergolong ke dalam urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan pilihan dan menjadi urusan pemerintahan konkuren lalu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kotamadya (menjadi kewenangan daerah). Penyerahan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren kepada daerah menjadi landasan atas penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan amendemennya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada konteks ini, daerah diperbolehkan untuk mengatur dan mengurus segala hal yang dianggap penting bagi wilayahnya, selama tidak melibatkan urusan yang sudah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Kesempatan ini menjadi langkah awal dalam menggali potensi sumber daya alam yang dimiliki, termasuk

optimalisasi pengelolaan kepariwisataan untuk meningkatkan perekonomian lokal.¹

Atas pembagian kewenangan tersebut, sejumlah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kotamadya dialihkan kepada pemerintah desa. Desa dianggap sebagai komunitas mandiri, yaitu suatu kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri. Artinya, desa diperbolehkan untuk memimpin dan mengelola kepentingan masyarakat selaras pada konteks sosial dan nilai budaya yang berlaku di daerah setempat. Oleh karena itu, peran desa dengan otonomi asli menjadi sangat penting sehingga tanggungjawab dari sisi pariwisata diberikan kepada desa. Hingga kini, tidak bisa disangkal bahwa pariwisata memiliki peran yang signifikan sebagai pendorong pembangunan. Industri pariwisata memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penghasilan per kapita rakyat.²

Perkembangan sektor pariwisata saat ini mengundang perdebatan yang dianggap merugikan masyarakat. Di sisi lain, beberapa faktor penghambat lainnya melibatkan kurangnya kecekatan, kemahiran, dan peraturan terkhusus di negara-negara yang masih dalam proses pembangunan. Diperlukan manajemen kewisataan yang efektif bertujuan memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitaran destinasi sehingga melahirkan konsep pengembangan pariwisata yang berorientasi lebih pada masyarakat,

¹ Josep Riu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1998, hlm. 16.

² I Wayan Eka Darma Putra, dan Anak Agung Ketut S., “Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Pemerintahan, 2015.

diketahui sebagai *Community Based Tourism* (CBT). Pada prinsipnya, CBT mencerminkan suatu ide yang kritis dan penting dalam perkembangan konvensional pariwisata, sering dikritik karena dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata.³

Keterlibatan aktif masyarakat memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga kelangsungan suatu destinasi wisata, karena masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam terhadap potensi wisata di sekitar daerahnya, dikenal sebagai warga sadar wisata. Terlibatnya warga lokal pada manajemen pariwisata dapat diketahui sebagai *Community Based Tourism* (CBT) dan/atau disebut juga sebagai pariwisata berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada kepemilikan, pengelolaan, dan partisipasi warga pada kegiatan kepariwisataan. Beda halnya dengan pendekatan ekowisata yang fokus di pelestarian ekologi, CBT bisa dianggap berhasil jika mampu mengakomodasi keperluan sosial, memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan bisa dikerjakan untuk keperluan komersial.

Community Based Tourism umumnya berskala kecil yang hanya melibatkan kelembagaan lokal sebagai pengelola, Setelah masyarakat terlibat secara aktif, diperlukan suatu forum atau struktur organisasi sebagai tempat untuk menampung aspirasi-aspirasi mereka.⁴ Di sini, keberadaan lembaga lokal menjadi esensial baik itu lembaga yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun lembaga lokal yang

³ Maria Dolezal and Novelli Marina, "Power in Community Based Tourism: Empowerment and Partnership in Bali", *Journal Of Sustainable Tourism*, 2016, hlm.1-22.

⁴ Imanniyar Ayu Anggraeni dan Farida Rahmawati, "Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Hutan Mangrove Pancer Cengkong, Trenggalek", *Jurnal Planoeearth*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 56-61.

muncul atas inisiatif masyarakat setempat di sekitar destinasi wisata tersebut. Lembaga lokal ini merupakan struktur sosial lokal yang hadir di tengah-tengah individu dalam kehidupan sehari-hari mereka, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terbukti bahwa peran lembaga lokal tidak hanya terbatas pada pengaturan kehidupan masyarakat, tetapi juga mempunyai peran yang sangat krusial dalam perkembangan ekonomi suatu komunitas. Manajemen yang efektif terhadap lembaga pariwisata akan menghasilkan dampak positif pada sektor pariwisata secara keseluruhan.

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sebuah lembaga lokal yang aktif dalam sektor pariwisata, dikenal sebagai Kelompok Tanggap Api Desa Mendis (Ketan Adem). Ketan Adem yakni pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola objek wisata Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir. Pemilihan Ketan Adem sebagai subjek penelitian, ini sesuai dengan niat peneliti yang mengkaji partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan objek pariwisata. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat lokal menjadi suatu tanda dari pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Lebih daripada itu, Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis juga merupakan satu-satunya potensi embung desa yang berada di wilayah sekecamatan Bayung Lencir serta secara atraktif dikelola oleh kelompok lokal (Ketan Adem) terkait pengelolaan maupun pengembangannya.

Desa Mendis adalah desa yang menjadi fokus perhatian PHE Jambi Merang melalui pelaksanaan Program Desa Cinta Bumi Tanggap Api sejak tahun 2017. Inisiatif ini mengimplementasikan embung sebagai reservoir air dan melakukan

penanaman vegetasi di sekitar area embung. Setahun setelahnya, terjadi penyegaran embung dan peresmian zona wisata, serta penyediaan arena permainan air, dengan tim penyelamat Ketan Adem turut berpartisipasi. Pada tahun 2019, dilakukan peningkatan fungsi embung dengan penambahan fasilitas wahana air dan kolam renang anak. Tahun lalu, sejalan dengan dampak pandemi Covid-19, disertakan penyediaan sarana protokol kesehatan di area sekitaran embung.⁵

Awal mula inisiatif pembentukan objek wisata ini tidak luput dari kerjasama kelompok masyarakat yakni Kelompok Tanggap Api Desa Mendis dibantu BUMDes Mendis Laut Maju yang bersinergi pada Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dengan mengupayakan kolaborasi guna mengembangkan embung desa agar dapat dijadikan wisata edukasi masyarakat, lalu berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk mendukung perekonomian desa dan pastinya menambah kesejahteraan masyarakat. Oleh sebabnya, sejak diresmikan sebagai objek destinasi wisata Ketan Adem berperan sangat krusial terhadap Embung Desa Cinta Bumi, mulai dari perawatan, pengelolaan sampai dengan peningkatan versi dari embung desa tersebut.⁶

⁵ Jakarta, Liputan 6, “Cara PHE Jambi Merang Ciptakan Masyarakat Madani Cinta Bumi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4779019/cara-phe-jambi-merang-ciapkan-masyarakat-madani-cinta-bumi>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

⁶ Palembang, Times Indonesia, “Desa Mendis, Desa Cinta Tanggap Api dan Wisata yang Didukung PHE Jambi Merang”, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/341666/desa-mendis-desa-cinta-tanggap-api-dan-wisata-yang-didukung-phe-jambi-merang>, diakses pada tanggal 16 April 2021.

Pencapaian di Desa Mendis dengan Desa Cinta Buminya melalui Ketan Adem menjadi sorotan utama kala itu sehingga menjadi dasar pertimbangan agar dapat direplikasikan di lain lokasi, contohnya seperti sekolah plastik di Desa Sukajaya yang sudah pernah mendapatkan penghargaan Piala Adiwiyata dan akan lanjut berkompetisi lagi untuk memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi, yang mana pencapaian ini merupakan pola kerja sama kemitraan pihak PHE Jambi Merang bersama pihak desa setempat. Beranjak dari hal tersebut, terdapat pula pasar wisata disekitaran objek wisata yang menjadi ciri khas dari objek wisata embung desa dan bermuara pada keberhasilan program desa cinta bumi sehingga menggugah pemikiran masyarakat setempat untuk membuka peluang pekerjaan tambahan disela waktu senggang. Tidak hanya itu, objek wisata embung desa cinta bumi di Desa Mendis ini juga sering direkomendasikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan perkemahan.⁷

Desa Mendis juga turut serta dalam pengembangan Ketan Adem dengan aktif terlibat dalam manajemen pariwisata di area embung, menggunakan tanah khas Desa Mendis sebagai tempat bermufakat, perencanaan tindakan, dan bertukar pikiran antar warga. Awalnya, embung Desa Mendis dirancang untuk menyediakan pasokan air bersih selama musim kemarau dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar Desa Mendis. Embung tersebut tetap memiliki sumber air yang berkelanjutan dari air tanah sehingga tidak pernah mengalami kekeringan. Melalui kesepakatan antara PHE Jambi Merang dan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi wisata air di embung, tujuan kedepannya tidak

⁷ *Ibid.*

hanya mencakup pendapatan desa, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui perdagangan kuliner dan aksesoris. Setelah dibangun oleh PHE Jambi Merang pada tahun 2017, embung sebagai objek wisata mampu menghasilkan lapangan kerja serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lokasi yang sebelumnya kurang terawat, berkat dukungan dari PHE Jambi Merang, kini telah menjadi tempat yang bernilai, terjaga, dan indah.

Namun dalam pengelolaan objek wisata Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis belum maksimal, dewasa ini bisa ditinjau dari fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, aksesibilitas jalan yang buruk dan lumayan jauh dari jalan raya, penerangan jalan yang belum tersedia, minimnya daya tarik berupa aksesoris khas daerah objek wisata serta belum ada inovasi terkini yang dapat mendorong perkembangan lebih lanjut dari sektor pariwisata ini. Selain itu, karena kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang berupa inovasi menuju masyarakat madani yang cinta bumi menyebabkan objek wisata Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis diserahkan pengelolaan serta pengoperasiannya secara penuh kepada kelompok tanggap api Desa Mendis. Meskipun telah difasilitasi dan dibekali pelatihan yang intens dari pihak PHE Jambi Merang untuk mengelola objek wisatanya secara mandiri, justru pada pelaksanaannya malah menimbulkan masalah tersendiri seperti ketersediaan dan kesiapan SDM yang belum mumpuni dalam hal pengembangan dan inovasi objek wisata.⁸

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

Kemudian, menariknya penelitian ini dilaksanakan karena berkaitan dengan keistimewaan program desa cinta bumi yang terkesan memiliki unsur orisinal, unik dan menjadi salah satu gagasan inovasi kreatif wisata di desa dengan wahana baru melahirkan suatu pasar pariwisata di desa dengan akses yang terjangkau dan ekonomis. Selain itu, inisiatif ini bisa membuat peluang kerja dan mendukung perkembangan UMKM, serta memberikan keuntungan kepada kelompok yang lebih rentan seperti janda dan pengangguran khususnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Penelitian ini mengacu pada kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang dipelajari oleh penulis. Pemilihan penelitian terdahulu dilakukan setelah dilakukan analisis yang cermat terhadap kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih baik dan menjadi sumber referensi yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kajian pustaka memiliki peran penting dalam penelitian, karena membantu mengidentifikasi aspek atraktif dan memperjelas perbedaan antara penelitian yang tengah dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berusaha memetakan kajian pustaka mengenai konsep pengelolaan objek wisata, hal ini karena penelitian ini berhubungan langsung dengan masalah tersebut khususnya terkait pengimpelmentasian *Community Based Tourism* (CBT) dalam mengelola objek wisata. Maka penelitian ini ingin menampilkan dari tema penerapan konsep CBT, perspektif mana topik yang belum banyak diteliti. Sehingga kesempatan untuk meneliti topik efektivitas penerapan konsep CBT ini masih terbuka lebar untuk mendapatkan kebaruan dan

signifikansi penelitian. Karenanya, fokus utama dari penelitian ini terletak pada topik efektivitas penerapan konsep CBT dalam pengelolaan objek wisata.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan tujuh artikel jurnal nasional dan tiga artikel ilmiah internasional yang relevan untuk memetakan penelitian tentang penerapan konsep CBT dalam pengelolaan objek wisata. Penelitian terdahulu yang membahas tentang peran dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata terdiri dari enam artikel. Penelitian oleh Berry Ziwista pada tahun 2016, Dhimas Setyo Nugroho pada tahun 2017, Manik Sunuantari pada tahun 2017, dan Rosdiana Pakpahan pada tahun 2018 fokus pada peran masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa penduduk setempat menyadari kepentingan terlibat secara aktif dalam pengelolaan desa mereka sebagai sumber daya tarik,⁹ serta segala bentuk peran masyarakat lokal secara nyata terlihat melalui dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik bahwa desa wisata dapat mengembangkan strategi untuk menjaga keberlanjutan dari persaingan dalam industri pariwisata melalui tingkat partisipasi masyarakatnya yang tinggi.¹⁰ Kegiatan komunikasi pariwisata yang melibatkan masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), penggiat pariwisata, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan potensi wisata budaya dan kearifan lokal.¹¹

⁹ Rosdiana Pakpahan, "Implementasi Prinsip Pariwisata Berbasis Komunitas Di Desa Wisata Nglinggo Yogyakarta", *Jurnal Master Pariwisata*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 129-146.

¹⁰ Dhimas Setyo Nugroho, "Desa Wisata Sebagai Community Based Tourism", *Jurnal Upajiwa Dewantara*, Vol. 1 No.2, 2017, hlm. 68-82.

¹¹ Manik Sunuantari, "Tourism Communication in Community Based Tourism in Dieng Community, Central Java, Indonesia", *Journal Binus Business Review*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 149-156.

Kemudian penelitian dari Faris Nurrahman pada tahun 2018, Rachmawati Novaria dan Afifatur Rohimah pada tahun 2017 fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui manajemen dan promosi strategi pengembangan destinasi pariwisata yang berimplikasi terhadap keberhasilan kelompok sadar wisata menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata melalui model pengembangan *Community Based Tourism* sebagai metode pemberdayaan ekonomi rakyat setempat untuk pemasaran sekaligus pemajuan objek wisata.¹²

Penelitian terdahulu yang membahas terkait strategi pengembangan dan dampak konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengelolaan objek wisata terdiri dari empat artikel. Penelitian yang dilakukan Elina Elfianita pada tahun 2016, Ni Made Irnawati dkk. pada tahun 2016, dan Aziizah Qurrotu Aiini pada tahun 2019 fokus penelitiannya pada CBT dilakukan melalui beberapa strategi, termasuk promosi, pengembangan infrastruktur, implementasi sapta pesona, serta peningkatan fasilitas dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata.¹³ Kemudian membagikan penjelasan mendalam mengenai produk pariwisata berbasis masyarakat dengan melaksanakan inisiatif evaluasi persepsi masyarakat

¹² Faris Nurrahman, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) melalui Kelompok Sadar Wisata". *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 1-14.

¹³ Elita Elfianita, "Pengembangan Pariwisata Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga". *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 5 No. 3, 2016.

sebagai tuan rumah dan wisatawan¹⁴ serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat bisa diamati melalui empat dimensi teori sifat yakni dimensi kecerdasan, kedewasaan dan kebebasan relasi sosial, motivasi diri dan motivasi brprestasi, serta interaksi antar manusia.¹⁵

Penelitian dari Dewi Rahayu dkk. pada tahun 2017 lebih fokus penelitiannya untuk memaparkan tentang dampak dari konsep *Community Based Tourism*. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa konsekuensi ekonomi diperoleh dari penerapan CBT di Desa Wisata Kuin yaitu dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya merujuk pada berkembangnya usaha restoran atau toko di sekitar lokasi tempat wisata, lapangan kerja, pengembangan jasa penyewaan kapal dan jasa parkir. Dampak tidak langsungnya seperti pengembangan UMKM pembuatan kerupuk ikan sungai, usaha kuliner soto banjar, dan kerajinan tanggui. Kemudian, untuk dampak lanjutannya merujuk pada pembangunan akses jalan dan tersedianya dermaga yang representatif.¹⁶

Beberapa penelitian terdahulu tersebut kemudian dapat diklasifikasikan menjadi dua pengelompokan yakni peran dan pemberdayaan masyarakat lokal,

¹⁴ Ni Made Irnawati, Dale Sanders, And Rose Dowling, "Host Guest Orientations of Community Based Tourism Products: A Case Study in Bali, Indonesia". *International Journal of Tourism Research*, 2016, hlm. 1-16.

¹⁵ Aziizah Qurrotu Aiini, "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten". *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 8, No. 2, 2019, hlm. 1-9.

¹⁶ Dewi Rahayu, Ika Chandriyanti, And Noor Rahmini, "The Tourism Economic Impact From Applied Of Community Based Tourism Concept (Study In Kuin Tourism Village Banjarmasin, South Kalimantan)", *International Journal of ICEBAST*, 2017, hlm. 144-149.

lalu strategi pengembangan dan dampak konsep *Community Based Tourism*. Lebih jelasnya ringkasan klasifikasi tersebut bisa dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Ringkasan Studi Pustaka

No	Jenis Pengelompokan	Hasil/Temuan
1.	Peran dan pemberdayaan masyarakat lokal	Penelitian dari Berry Ziwiasta, ¹⁷ Dhimas Setyo Nugroho, Manik Sunuantari, Rosdiana Pakpahan, ¹⁸ Faris Nurrahman, dan Rachmawati Novaria, Afifatur Rohimah ¹⁹ mengemukakan bahwa masyarakat lokal yang berperan sebagai pengelola kegiatan pariwisata berbasis masyarakat untuk kegiatan perancangan, investor, implementasi, mengelola dan menilai serta peran masyarakat dalam bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, pemberdayaan masyarakat lokal dilaksanakan dalam mengelola serta memajukan destinasi wisata guna meningkatkan partisipasi

¹⁷ Bery Ziwiasta, "Pengelolaan Berbasis *Community Based Tourism* Pada Objek Wisata Air Panas Pawan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 1-16.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 129-146.

¹⁹ Rachmawati Novaria dan Afifatur Rohimah, "*Pengembangan Comunity Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemasaran Pariwisata di Wonosalam Kabupaten Jombang*", Makalah Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sidoarjo-Indonesia, 2017, hlm. 91-101.

		msyarakat dalam pembangunan pariwisata.
2.	Strategi pengembangan dan dampak konsep CBT	Elina Elfianita, Ni Made Irnawati et al., Aziizah Qurrotu Aiini, dan Dewi Rahayu et al., ²⁰ menjelaskan bahwa strategi pengembangan pariwisata berbasis <i>Community Based Tourism</i> (CBT) melibatkan pendekatan melalui promosi, pembangunan infrastruktur, implementasi konsep sapta pesona, peningkatan fasilitas kepariwisataan, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang produk pariwisata yang berakar pada partisipasi masyarakat setempat. Adapun dalam pelaksanaannya, konsep CBT ini berimplikasi terhadap perekonomian yang terdiri atas dampak langsung, dampak tidak langsung dan dampak lanjutan.

Sumber: *Diolah oleh penulis (2023)*

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah di kelompokkan pada tabel 1, masing-masing penelitian membahas tentang peran dan pemberdayaan masyarakat lokal, lalu strategi pengembangan dan dampak konsep CBT. Namun, belum ada penelitian yang komprehensif membahas tentang efektivitas penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengelolaan

²⁰ *Ibid*, hlm. 144-149.

objek wisata. Demikian karenanya, kebaruan dalam penelitian ini adalah fokus untuk menjelaskan efektivitas penerapan konsep CBT yang lebih rinci dan detail dalam pengelolaan wisata. Dengan dasar informasi latar belakang tersebut, penelitian ini akan menyelidiki secara lebih rinci mengenai “*COMMUNITY BASED TOURISM* DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA EMBUNG DESA”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan masalah bahwa konsep pariwisata berbasis masyarakat yang telah diterapkan di Desa Mendis dalam pengelolaannya belum sepenuhnya optimal. Dewasa ini merujuk pada ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengoperasionalkan wisata secara mandiri serta beberapa faktor lain seperti aksesibilitas jalan, penerangan, juga sarana dan prasarana kegiatan kepariwisataan yang belum memadai, sehingga kerap kali berimplikasi langsung pada proses dan progres pelaksanaannya. Maka darisinitilah penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana efektivitas penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan objek wisata Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas dari penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan objek wisata Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diinginkan agar bantuan pemikiran ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan, terutama terkait dengan konsep Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di destinasi wisata.

2. Secara praktis

- a. Temuan penelitian ini diharapkn bisa memberikan kontribusi dalam memberikan solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang sedang diselidiki.
- b. Dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk menambah pemahaman bagi pembaca dan penulis itu sendiri terkait konsep *Community Based Tourism*.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan dapat dijelaskan sebagai serangkaian tugas yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mengeksekusi sejumlah pekerjaan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Sobri dkk. dalam bukunya “Pengelolaan Pendidikan” mengemukakan bahwasanya pengelolaan merupakan tindakan perancangan, penyusunan, pengawasan, peletakan, pengarahan, stimulus, interaksi, dan proses keputusan ketetapan yang dijalankan oleh setiap organisasi. Dimaksudkan untuk mengatur beragam sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat menciptakan produk atau jasa dengan efisien.²¹

²¹ Sobri, et al., “*Pengelolaan Pendidikan*”, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009.

Pariwisata, menurut pandangan ahli yang disebutkan dalam karya Oka A. Yoety, dapat diartikan sebagai serangkaian fenomena untuk memunculkan korelasi dari interaksi antara pengunjung, koalisi perusahaan yang menyediakan layanan kepada pengunjung dan pemerintah serta masyarakat yang berperan sebagai tuan rumah dalam usaha menarik dan melayani para pengunjung.²² Senada dengan itu, kepariwisataan merupakan perjalanan untuk tujuan liburan, hiburan, keperluan bisnis, atau tugas dinas, atau alasan lainnya. Seringkali, perjalanan ini terjadi karena keperluan bisnis atau acara penting, dan pindah sementara dari tempat tinggal utama, dengan catatan bahwa perjalanan dinas terkecuali dari perjalanan rutin ke tempat kerja sehari-hari.²³

Menurut Ritchie dan Crouch, pengelolaan pariwisata adalah proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian semua elemen dan aspek-aspek industri pariwisata.²⁴ Pengelolaan pariwisata mencakup aspek-aspek seperti pelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengaturan dan pengawasan kegiatan pariwisata, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam pengelolaan pariwisata, perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan manfaat sosial untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

²² Oka A. Yoeti, *“Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata”*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm 108.

²⁴ J. R. B. Ritchie dan G. I. Crouch, *“The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective”*, *Journal of Tourism Management*, Vol. 21 No.1, 2000, hlm. 1-7.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulanya bahwa pengelolaan pariwisata adalah suatu mekanisme yang mencakup perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan segala kegiatan yang terkait dengan sektor pariwisata.

a. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan pariwisata

Pengelolaan pariwisata perlu berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan alam, kesejahteraan kelompok, dan nilai-nilai sosial. Hal ini bertujuan agar pengalaman wisatawan tetap menyenangkan dan sekaligus memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Dowling dan Fennel dalam bukunya *“Ecotourism Policy and Planning”* mengutarakan bahwa pengelolaan sektor pariwisata wajib mencermati beberapa prinsip berikut:

- (1) Pembangunan serta pengembangan sektor pariwisata perlu berasaskan pada kebijaksanaan internal dan rasa keunikan khas setempat yang merefleksikan warisan budaya serta keistimewaan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan, perlindungan, dan penguatan kualitas sumber daya menjadi dasar bagi perkembangan area destinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik pariwisata lanjutan yang berakar pada warisan budaya lokal.
- (4) Pemberian layanan ke pengunjung yang didasarkan pada keistimewaan lingkungan dan kebudayaan setempat.

(5) Memberikan sokongan dan pengukuhan pada pembangunan serta pertumbuhan sektor pariwisata apabila dapat menghasilkan pembuktian dampak yang baik, namun sebaliknya mengatur penghentian kegiatan pariwisata tersebut jika melewati batas lingkungan alam, meskipun seiringnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.²⁵

b. Bentuk-bentuk Pengelolaan Pariwisata

1. Konsep *Community Based Tourism* (CBT)

Ide dasar pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pertama kali dikenalkan oleh Murphy pada tahun 1985. Murphy berpendapat bahwasanya produk pariwisata harus diekspresikan dan dikonsumsi secara lokal, lebih daripada itu produk pariwisata serta konsumennya harus terlihat oleh penduduk setempat yang sering dipengaruhi oleh turisme. Untuk itu, pariwisata sebagai bagian dari produk pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, dan industri harus melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.²⁶ Hal ini menyiratkan bahwa konsekuensi akumulatif dari pengembangan pariwisata akan ditanggung oleh penduduk setempat, dan mereka seharusnya memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam cara mereka dipresentasikan dan dipasarkan sebagai produk wisata.

Istilah *community based tourism* (CBT) mengilustrasikan pengembangan pariwisata yang memaksimalkan manfaat lokal, mendukung pembangunan

²⁵ Dowling Ross K. dan David A. Fennell, "*Ecotourism Policy and Planning*", Cambridge: CABI Publishing, 2003.

²⁶ P.E. Murphy, "*Tourism: A Community Approach*", London: Methuen, 1985.

masyarakat. Konsep ini memberikan mafaat lebih pada perekonomian, kontribusi pembangunan dan pengentasan kemiskinan, penguatan budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, pertukaran lintas budaya, serta pelestarian lingkungan alam. CBT juga mencerminkan kesepadanan yang nyata dalam pengembangan komunitas secara menyeluruh dan perencanaan partisipatif yang turut mendukung mekanisme masyarakat di ttingkat lokal. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya CBT dapat membangun komunitas yang lebih aktif dan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial dan sikap saling menghormati.²⁷

Konsep pariwisata berbasis masyarakat memiliki beberapa tujuan yang diantaranya ialah untuk mencapai partisipasi lokal, sebagian besar kegiatan kepariwisataan dikembangkan dan dioperasikan oelh kumpulan masyarakat setempat. Kemudian pendapatan diarahkan kepada masyarakat melalui berbagai cara potensial, seperti koperasi, bisnis yang mempekerjakan orang lokal atau brbagai pengusaha yang baru memulai atau mengoperasikan usaha kecil dan menengah. Dewasa ini juga bertujuan untuk menghormati warisan budaya dan tradisi lokal. Oleh karena itu, aspek-aspek terkait tujuan CBT hendaknya Dipandang secara komprehensif untuk menentukan aspek-aspek mana yang dapat memberikan manfaat atau berimbas pada kelompok, termasuk aspek ekonomi, budaya, sosial, lingkungan, dan politi.

²⁷ Kirsty Blacstock, "Acritical Look At Community Based Tourism". *Journal of Community Development*, Vol 40 No.1, 2005, hlm. 50-78.

Pontjana Suansri dalam bukunya “*Community Based Tourism Handbook*” mengemukakan lima dimensi utama pengembangan konsep pariwisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, yaitu:

- 1) Aspek ekonomi, yang dapat diukur melalui keberadaan anggaran untuk memajukan kelompok, penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata, dan peningkatan penghasilan masyarakat setempat dari kegiatan pariwisata.
- 2) Aspek sosial, yang dapat dilihat dari peningkatan mutu kehidupan, meningkatnya rasa bangga dalam komunitas, pemberdayaan yang adil bagi semua jenis kelamin dan berbagai kelompok umur, dan upaya memperkuat kesatuan komunitas.
- 3) Aspek budaya, yang mencakup upaya warga untuk memahami sekaligus menghargai keragaman budaya, mendukung pertukaran budaya, dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya terkait erat dengan pengembangan lokal.
- 4) Aspek lingkungan, yang melibatkan penilaian terhadap daya dukung area, pengelolaan sampah yang teratur, dan peningkatan kesadaran akan kebutuhan akan konservasi.
- 5) Aspek politik, yang dapat diukur melalui peningkatan partisipasi masyarakat lokal, penguatan kekuatan komunitas secara keseluruhan, dan penjaminan hak-hak terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).²⁸

²⁸ Potjana Suansri, “*Community Based Tourism Handbook*”, Thailand: Responsible Ecological Social Tour-Rest, 2003, hlm. 22.

2. Konsep *Sustainable Tourism*

Pariwisata berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (*The World Tourism Organization*) merujuk pada bentuk pariwisata yang sepenuhnya memperhitungkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, baik saat ini maupun di masa mendatang. Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk mencukupi keperluan wisatawan, industri pariwisata, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan kelompok lokal.²⁹

Tujuan pariwisata berkelanjutan merujuk pada tujuan dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Tujuan dari pembangunan berkelanjutan mencakup: (1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan yang bersumber dari masyarakat untuk membangun yang fokus pada pemenuhan kebutuhan utama penduduk. (2) Pencapaian tujuan lingkungan yang berkelanjutan dengan menjaga dan mempertahankan lingkungan, khususnya dengan memelihara sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.³⁰

Kemudian daripada itu, prinsip keberlanjutan membidik fokus di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya ketika mengembangkan pariwisata. Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, diperlukan suatu keseimbangan yang sesuai antara ketiga dimensi tersebut, melalui:

²⁹ K. P. R. Indonesia, "Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan *Green Jobs* untuk Indonesia", Jakarta: International Labour Organization, 2012.

³⁰ R. Sharpley, "*Travel and tourism*", Los Angeles: Sage Publications, 2006.

- 1) Optimalisasi penggunaan sumber daya lingkungan, sama dengan kunci dalam perluasan pariwisata, untuk menjaga mekanisme ekologi penting dan mendukung pelestarian warisan alam serta keanekaragaman hayati.
- 2) Menghargai kemurnian sosial-budaya warga setempat, merawat warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang terbangun dan hidup, serta berperan dalam meningkatkan pengertian dan sikap toleran terhadap kebudayaan.
- 3) Meneguhkan kelangsungan operasional ekonomi jangka panjang dengan pemerataan dampak sosial ekonomi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk menyediakan pekerjaan yang konstan, peluang pendapatan dan layanan sosial untuk mendukung kesejahteraan penduduk sekaligus berperan dalam upaya mengurangi kemiskinan.³¹

1.5.2 Efektivitas

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yakni "*effective*" yang artinya mencapai keberhasilan atau berhasil dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam kamus ilmiah terkemuka, efektivitas sama dengan ketepatan pemakaian, hasil yang bermanfaat atau sokongan mengenai tujuan. Efektivitas dianggap sebagai komponen inti ketika hendak mencapai tujuan sesuai ketentuan ketika berorganisasi, kegiatan atau program. Saat ini, suatu hal dipandang efektif bila mampu mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan.³²

³¹ Fauziah Edyyono, "*Pengelolaan Destinasi Pariwisata*", Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

³² Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01, 2012, hlm. 3.

Meneurut Abdulrahmat, didefinisikan efektivitas sebab meliputi pendayagunaan sumber daya, fasilitas dan infrastruktur untuk jumlah terbatas yang telah secara sengaja dipatenkan sebelumnya, dengan tujuan untuk menciptakan segenap pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Dewasa ini diartikulasikan sebagai pengukuran, yakni terstrukturnya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Efektivitas berkorelasi pula pada bagaimana mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, manfaat atau kegunaan dari hasil yang dicapai, tingkat fungsionalitas suatu elemen dan tingkat kepuasan pengguna.³³

Mengevaluasi kinerja sebuah organisasi bisa dilaksanakn melalui konsep efektivitas, yang merupakan salah satu kriteria untuk menentukan apakah perubahan besar dalam struktur dan manajemen organisasi diperlukan atau tidak. Lebih daripada itu, efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan efisiensi, yang dilihat dari aspek masukan (*input*), proses, dan hasil (*output*). Dalam konteks ini, sumber daya mencakup ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas dan infrastruktur, serta konsep yang diterapkan. Efisiensi suatu kegiatan dapat tercapai apabila pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang benar, sementara keefektifan suatu kegiatan dicapai ketika pelaksanaannya tepat dan menghasilkan hal yang bermanfaat.³⁴

³³ Abdulrahmat, "*Efektivitas Implementasi*", Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm. 92.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4.

Dengan demikian, sebuah kegiatan organisasi dianggap efektif apabila dilaksanakan selaras dengan kebijakan dan mencapai target/sasaran yang sudah dipastikan oleh organisasi tersebut.

a. Bentuk Efektivitas

Efektivitas dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk tergantung pada konteks dan tujuan yang spesifik/terarah. Lebih daripada itu, dewasa ini tidak selalu dapat diukur secara langsung sebab metrik efektivitas bisa bervariasi. David J. Lawless dalam Gibson, Inancevich dan Donnelly mengutarakan bahwasanya efektivitas mempunyai tiga strata, yaitu:

1. Efektivitas Individu, merupakan perspektif yang berfokus pada kinerja individu, mengukuhkan pada hasil kerja pegawai.
2. Efektivitas kelompok, mengacu pada kenyataan bahwa kolaborasi dilakukan individu ketika berada di suatu organisasi. Oleh karena itu, dewasa ini merupakan hasil dari bantuan yang diberikan oleh seluruh anggota organisasi.
3. Efektivitas organisasi (gabungan individu dan kelompok). Melalui kerjasama yang harmonis, suatu komunitas sanggup mencapai hasil karya yang lebih besar daripada jumlah hasil karya dari setiap bagian secara terpisah. Lebih daripada itu, konteks ini bisa dijelaskan berupa level

pencapaian target yang mencerminkan sampai mana tujuan sudah tergapai.³⁵

b. Ukuran Efektivitas

Mengevaluasi keefektifan suatu organisasi bukanlah tugas yang sederhana, karena penilaian efektivitas dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan dan siapa yang melakukan penilaian serta interpretasinya. Jika dilihat dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi dapat menjelaskan bahwa efektivitas mencakup kualitas dan jumlah (*output*) barang dan jasa. Level efektivitas bisa diukur dengan memadankan antara rencana yang telah ditetapkan dan hasil nyata pencapaian. Namun, apabila tindakan atau hasil kinerja tidak sesuai sehingga menimbulkan ketidakmencapaian tujuan yang didambakan, maka kondisi tersebut dianggap tidak efektif.³⁶

Parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sebagaimana dijelaskan oleh S.P. Siagian, adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan yang jelas mengenai ketercapaian tujuan, bertujuan supaya pegawai dapat menjalankan tugas mereka dengan merenggut sasaran terfokus, sehingga tujuan organisasi berhasil terwujud.
- b. Siasat gamblang menuju tujuan, mengingat taktik merupakan langkah-langkah yang diambil dalam upaya meraih target yang sudah ditetapkan.

³⁵ Gibson JL, JM Invancevich dan JH Donnelly, "*Organisasi*", terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 120.

³⁶ *Ibid*, hlm. 5.

Hal ini dimaksudkan supaya pelaksana tidak menyimpang dari pencapaian tujuan organisasi.

- c. Proses analisis dan pembuatan kebijakan yang kuat, berkaitan pada ketercapaian tujuan dan siasat yang telah diidentifikasi, berarti bahwa peraturan wajib menghubungkan seluruh tujuan berasama ragam usaha penyelenggaraan kegiatan .
- d. Perancangan yang cermat, pada dasarnya merupakan keputusan untuk menentukan aktivitas mendatang bagi organisasi.
- e. Pemilihan program yang sesuai merupakan langkah penting setelah merancang rencana yang baik, karena tanpa rincian program pelaksanaan yang tepat, pelaksanaan tugas oleh para eksekutor bisa kekurangan panduan dan arahan yang diperlukan.
- f. Keberadaan fasilitas dan infrastruktur kerja merupakan salah satu tanda efektivitas suatu organisasi, menunjukkan kesangupan untuk bekerja dengan produktivitas. Dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang telah disediakan atau mungkin akan disediakan oleh organisasi.
- g. Penyelenggaraan yang efektif dan efisien sangat penting. Meskipun suatu inisiatif memiliki kualitas baik, namun jika tidak dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien, maka organisasi tidak akan mendapatkan tujuannya. Pelaksanaan yang baik mendekatkan organisasi pada pencapaian tujuan mereka.

- h. Diperlukan sistem pemeliharaan dan pengoperasian yang bersifat mendidik, mengingat manusia memiliki sifat yang tidak sempurna. Demikian karenanya, organisasi perlu memiliki mekanisme pemeriksaan dan penjagaan untuk memastikan kinerja yang optimal.³⁷

Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengutarakan terkait ukuran efektivitas, antara lain:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian ialah upaya komprehensif perolehan target yang dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu proses. Kemudian daripada itu, untuk memastikan *output* biar lebih terjamin, dibutuhkan tahapan-tahapan, baik dalam hal klasifikasi ketercapaian ataupun penjadwalan. Pencapaian tujuan melibatkan sejumlah faktor, seperti jangka waktu dan sasaran yang menjadi target konkret.

2) Integrasi

Integrasi merujuk pada evaluasi sejauh mana suatu organisasi mampu secara efektif mengorganisir sosialisasi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan beragam organisasi lainnya. Dalam hal ini, integrasi berkaitan dengan peningkatan intensitas mekanisme sosialisasi.

3) Adaptasi

³⁷ Sondang P. Siagian, “*Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*”, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Adaptasi merujuk pada kesanggupan organisasi untuk meenyelaraskan diri bersama lingkungan sekitar. Lebih daripada itu, konsep ini juga dipakai sebagai parameter dalam mekanisme perekrutan dan pemuatan tenaga kerja dalam pelaksanaanya.³⁸

Berdasarkan beberapa definisi pengukuran level efektivitas yang sudah dijelaskan sebelumnya, perlu peneliti garisbawahi bahwasanya dalam desain penelitian ini, menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Richard M. Steers, yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Melalui penerapan teori ini, diharapkan dapat mengukur level efektivitas ketika mengelola Objek Wisata Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis.

Definisi konseptual adalah penjelasan yang bersifat ringkasan mengenai suatu ide dengan cara yang singkat dan jelas. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, definisi konseptual dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pariwisata adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengarahkan perkembangan pariwisata suatu destinasi guna mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
2. Efektivitas adalah tingkat ketercapaian kinerja suatu tindakan atau aktivitas yang dikerjakan agar memperoleh sasaran yang didambakan dan telah ditentukan oleh organisasi.

Definisi operasional merupakan elemen pokok dalam suatu penelitian, karena bagian ini memberikan panduan mengenai cara mengukur suatu variabel selama

³⁸ M Richard Steers, "*Efektivitas Organisasi*", Jakarta: Erlangga, 1985, hlm. 53.

proses penelitian. Pada segmen ini, dijelaskan indikator variabel dan metode pengukuran yang akan digunakan untuk indikator tersebut. Definisi operasional yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada tiga komponen efektivitas yang berhubungan pada efektivitas organisasi menurut M Richard Steers. Alasannya karena penelitian ini hendak menjelaskan efektivitas pariwisata berbasis komunitas dalam pengelolaan objek wisata Embug Desa Cinta Bumi di Desa Mendis. Penjelasan indikator efektivitas yang berkaitan dengan efektivitas organisasi yakni sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

- a) Efisiensi, berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya seperti waktu dan anggaran.
- b) Realistis, berhubungan dengan spesifikasi sumber daya yang tersedia mesti terkait langsung dengan tujuan yang hendak dicapai, tidak boleh terlalu sulit atau terlalu mudah dicapai.

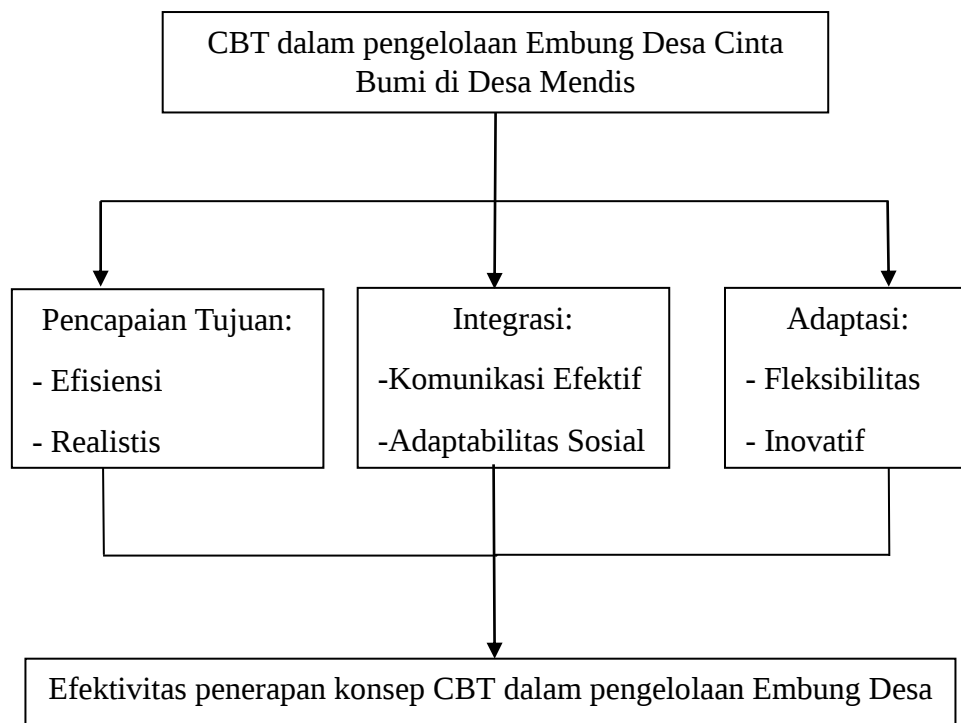
2. Integrasi

- a) Komunikasi efektif, berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan partisipasi aktif dalam diskusi maupun kegiatan sosial.
- b) Adaptabilitas sosial, berhubungan dengan kesanggupan untuk berorientasi pada lingkungan sosial serta sikap toleran terhadap perbedaan.

3. Adaptasi

- a) Fleksibilitas, berkaitan dengan kemampuan untuk menanggapi perubahan dengan cepat dan baik.
- b) Inovatif, berkaitan dengan kesanggupan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus adalah strategi penelitian yang melibatkan penyelidikan mendalam terhadap suatu inisiatif, aktivitas, kejadian, mekanisme, atau sekumpulan orang. Dalam studi kasus, peneliti fokus secara intensif pada

satu objek penelitian untuk memahaminya secara menyeluruh sebagai sebuah kasus.³⁹ Studi kasus dalam penelitian ini adalah objek wisata Embung Desa Cinta Bumi di Desa Mendis.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang tepat untuk penulis melakukan penelitian berada di objek wisata Embung Desa Cinta Bumi Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

1.7.3 Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merujuk pada data yang didapat secara langsung dengan melakukan studi langsung ke lokasi penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan memakai metode dokumentasi yaitu berupa pengambilan gambar di lokasi penelitian dan metode survei yakni melalui wawancara, salah satu metode memperoleh data secara langsung adalah melalui interaksi tatap muka langsung dengan informan, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diambil tidak secara langsung terkait fokus penelitian. Data sekunder diselenggarakan peneliti melalui pemanfaatan studi literatur, yakni data yang didapat melalui studi kepustakaan, buku, artikel jurnal, referensi-referensi, segala aturan hukum, dokumen, informasi daring, dan catatan yang terkait dengan subjek

³⁹ J.W. Creswell, *“Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed”*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2010.

penelitian, jika data tersebut tidak diperoleh secara langsung, dapat dikategorikan sebagai data sekunder.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Pemilihan subjek penelitian melalui penggunaan teknik *purposive sampling*, artinya menentukan informan dengan sengaja sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan seperti seseorang yang diakui memiliki pengetahuan terkait apa yang diharapkan atau peran sebagai penguasa akhirnya dapat membantu peneliti untuk menggali lebih dalam objek serta situasi sosial yang berkaitan dengan fenomena *community based tourism* (CBT) ketika mengelola objek wisata embung desa. Pada studi ini, peneliti menentukan informan yang mampu menyampaikan informasi selaras dengan ruang lingkup penelitian yang tengah dilakukann.

1.7.5 Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi sekaligus validnya data sehingga bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian ilmiah. Pendekatan ini dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu melalui proses wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara, Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara langsung (berupa tanya-jawab berbentuk komunikasi lisan) kepada seluruh narasumber yang terlibat. Metode wawancara yang diterapkan ialah wawancara teratur, dengan menyusun pertanyaan yang seragam untuk setiap narasumber. Dalam

penelitian ini yang akan menjadi informan bisa diamati pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Informan Utama Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Bapak Sugiyanto	Kepala Desa Mendis	Sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2.	Bapak Imam Mahmudi	Direktur BUMDes Mendis Laut Maju	Sebagai pemilik unit usaha di Desa Mendis.
3.	Bapak Tomy Yohana, S.H.	Ketua Ketan Adem	Sebagai pengelola objek wisata embung desa.
4.	Masyarakat Desa Mendis	-	Sebagai penduduk lokal yang membantu dalam pengelolaan embung desa.

2. Dokumentasi, melibatkan pencatatan dokumen dan data terkait penelitian ini yang berguna menjadi bukti atas hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Dokumentasi saat penelitian ini berupa foto saat wawancara, dan rekam jejak kegiatan yang dilakukan peneliti saat dilapangan.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Informasi yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi akan mengalami serangkaian tahapan pengolahan sebelum dapat digunakan. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, dan Effendi, terdapat empat fase dalam analisis data, yang mencakup pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data,

analisis antar-variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan.⁴⁰

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data-data yang telah didapat dari wawancara dan dokumentasi akan diolah selaras pada keperluan penelitian. Selanjutnya peneliti memilih data-data tersebut sepadan atau tidak terhadap indikator-indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Seleksi Data

Pada fase ini, data yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya akan dipilih dan disaring lagi untuk memperoleh informasi yang benar-benar bermanfaat dan relevan ketika proses analisis.

3. Analisis Antar Variabel dan Verifikasi Data

Langkah berikutnya sesudah seleksi data ialah mengaitkan antara satu variabel atau indikator dengan variable atau indikator lainnya.

4. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Semua temuan yang telah dijelaskan akan diinterpretasikan sebagai upaya untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Hasil interpretasi ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengambil kesimpulan dari keseluruhan rangkaian penelitian.

⁴⁰ Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, ME Atmojo, dan D Efendi, “*Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*”, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020.

1.7.7 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu dapat mengungkapkan keaslian yang obyektif dan oleh sebab itu keabsahan data menjadi hal yang benar-benar krusial. Tujuan dari hal ini adalah untuk menilai sejauh mana kredibilitas penelitian kualitatif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data pada penelitian ini diperoleh melalui penerapan teknik triangulasi, yang merupakan penggabungan beragam sumber data, peran peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian atau fenomena sosial. Dalam penelitian ini, metode triangulasi data digunakan, yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.⁴¹

⁴¹ A. Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*", Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 396.